

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita : Kota Semarang

Halaman 18

## Uang Jasa SPPT Dinaikkan 100%

**BALAIKOTA** - Uang jasa atau *fee* untuk Ketua RT/RW dalam melakukan pembagian dan penarikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2018 ini, dinaikkan 100 persen.

Hal itu disampaikan Kepala Bapenda Kota Semarang, Yudi Mardiana, usai penyampaian secara simbolis SPPT dan DHKP PBB tahun 2018 yang baru kepada Camat dan Lurah se-Kota Semarang di Balaikota, Kamis (8/3).

Menurutnya, uang jasa RT dari Rp 1.200 menjadi Rp 2.400 per lembar SPPT, dan untuk RW dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.000 per lembar.

"Itu untuk apresiasi dan memacu mereka agar penerimaan PBB ini mencapai target, yaitu Rp 376 miliar yang naik dari 2017 lalu Rp 346 miliar. Karena wajib pajak yang NJOP-nya di bawah Rp 130 ju-

ta, jelas berpengaruh pada penerimaan pajak secara keseluruhan. Karena dari pendataannya, jumlah obyek pajak dengan NJOP tersebut mencapai 148.777 objek atau 28,82 persen dari total PBB di Kota Semarang," tukasnya.

Ditambahkan Yudi, pihaknya tetap optimistis penerimaan PBB akan mencapai target. Pasalnya, adanya penghapusan PBB juga diimbangi kenaikan tarif PBB sebesar 349.148 objek pajak atau 67,64 persen (tarif naik 30 persen) dan 2,38 persen tarif objek pajak naik lebih dari 30 persen.

"Ada juga yang tarif PBB objek pajak itu tetap. Yaitu objek pajak yang berada di daerah rob, terkena sutet, daerah miring atau berisiko bencana," tambahnya.

Walikota Semarang, Hendrar Prihadi mengungkapkan, penerimaan PBB merupakan unsur pembiayaan pembangu-

nan di Kota Semarang. Maka, kerja Ketua RT dan RW harus lebih baik agar penerimaan pajak bisa optimal.

Terkait kenaikan dan penurunan tarif PBB, Hendi - sapaan akrabnya, menyampaikan hal itu diperoleh dari pertimbangan yang panjang. Di antaranya terkait inflasi di Kota Semarang yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan harga sejumlah komoditas juga ikut naik.

"Ini bukan inkonsistensi, tapi karena kami mendengar jeritan masyarakat dan untuk menjaga kondusivitas. Kami menyadari persoalan tarif ini sangat sensitif. Di mana-mana masih ada jalan yang rusak, masih ada lurah yang pungli. Kalau pelayanan belum sempurna, kemudian kita gas, pasti masyarakat bengok seperti di Tiongkok, Prancis dan Uni Soviet," terangnya. ■

*Hid-die*